

Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah Pada Periode 2016 – 2018

Muhamad Dimas Nugroho¹
Elistania²

Abstract

This study aims to analyze the policies established by Italy in tackling the crisis of illegal immigrants from the Mediterranean Sea lane that occurred in their country. The use of the Central Mediterranean Sea as an immigration route troubled the Italian government, because since the immigrant crisis occurred every year thousands of immigrants were swept away while trying to cross the Central Mediterranean Sea lane. Besides that these illegal immigrants are also considered to worsen economic and political conditions in Italy. This research is a qualitative research that uses International Immigrants Concepts and Maritime Security Concept to help analyze the research. The research show that the policies created by Italy in overcoming the crisis of illegal immigrants are the establishment of a Memorandum of Understanding with the Libyan government regarding Central Mediterranean Sea border guarding cooperation.

Keywords: *Central Mediterranean Sea, Foreign Policy, Illegal Immigrants, Italy.*

Pendahuluan

Krisis imigran merupakan masalah yang harus dihadapi Eropa akibat dari adanya permasalahan di negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Imigran-imigran tersebut memilih untuk meninggalkan negara mereka masing-masing dengan cara menyebrangi Laut Mediterania untuk menuju ke Eropa. Oleh karena itu, yang terkena dampak paling besar dari krisis imigran yang terjadi di Eropa adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, termasuk Italia yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania Tengah. Maka, Italia mempunyai hak untuk mengelola sumber daya dan seluruh kemampuan mereka untuk mengatasi krisis yang menimpa negaranya.

Benua Eropa dipilih para imigran ilegal karena jaraknya dekat dengan benua Afrika, mereka merasa Eropa mudah untuk dijangkau sehingga membuat para imigran berbondong-bondong menuju Eropa. Keamanan dan kondisi ekonomi negara-negara di Eropa juga lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara asal para imigran di Afrika. Untuk sampai ke benua Eropa, para imigran dari Afrika menggunakan jalur Laut Mediterania. Salah satu jalur yang paling diminati para imigran dari Afrika adalah rute Mediterania Tengah, yaitu dari negara asal mereka menuju Libya lalu mereka menggunakan perahu menuju ke Italia.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. (1542500432@student.budiluhur.ac.id)

² Dosen tetap dan Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

Implementasi Kebijakan Italia Dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah

Untuk mencapai Eropa, para imigran dari Afrika menggunakan jasa *people smuggler*, atau penyelundup di negara asal mereka. Para imigran membayar sejumlah uang ke agen penyedia jasa penyelundupan imigran tersebut, baru kemudian mereka diantar ke Libya, lalu di Libya mereka berlayar menuju Italia. Namun kapal yang mereka gunakan tersebut sangat tidak layak untuk menempuh lautan Libya menuju Italia yang sangat jauh. Kapal yang mereka gunakan hanyalah kapal kayu lama, dan tidak jarang para penyelundup tersebut hanya menyediakan kapal karet.

Masalah dari penggunaan jalur Laut Mediterania Tengah sebagai jalur migrasi adalah jalur tersebut terbukti sebagai yang paling berbahaya dibanding jalur Laut Mediterania lainnya. Hal ini dikarenakan jarak antara laut Libya dengan laut Italia sangat berjauhan. Bahaya dari jalur Laut Mediterania Tengah sebagai jalur imigrasi dapat dilihat dari jumlah imigran yang tenggelam di daerah tersebut. Pada tahun 2015, tercatat ada 2.876 imigran yang tenggelam di Laut Mediterania Tengah. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016, angka imigran yang tenggelam di Laut Mediterania Tengah semakin parah yaitu 4.581 imigran tenggelam.

Menanggapi krisis imigran yang terjadi di Laut Mediterania Tengah, Italia dan negara-negara Uni Eropa lainnya setuju untuk membentuk *Operation Sophia*. *Operation Sophia* merupakan program angkatan laut multi-fase yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan Laut Mediterania untuk mengurangi jumlah imigran yang datang dari daratan Afrika menuju Eropa. Fase pertama dari *Operation Sophia* adalah untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku penyelundupan imigran di Laut Italia. *Operation Sophia* juga menjadi program *search and rescue* milik Uni Eropa di Laut Mediterania Tengah, untuk menyelamatkan kapal para imigran yang terjebak di Laut Mediterania Tengah dengan harapan mampu menurunkan angka korban jiwa di Laut Mediterania Tengah. Imigran-imigran yang telah diselamatkan tersebut dibawa ke daratan Italia dan kemudian dipindahkan ke negara-negara Uni Eropa lain, sebagai program realokasi milik Uni Eropa. *Operation Sophia* di fase selanjutnya juga memiliki fase lanjutan untuk melakukan program identifikasi dan penangkapan di Lautan Libya, untuk meningkatkan penjagaan perbatasan Libya dan menangkap para pelaku penyelundupan dari Libya.

Setelah satu tahun *Operation Sophia* berjalan, jumlah imigran yang melalui jalur Laut Mediterania Tengah tidak mengalami penurunan. Sebaliknya, jumlah imigran yang menuju daratan Italia semakin naik. Pada 2015, jumlah imigran yang datang dari daratan Afrika menuju Italia menggunakan jalur Laut Mediterania Tengah adalah 153.842 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2016, yaitu 181.436 orang. Menanggapi krisis imigran yang semakin parah tersebut, pemerintah Italia merasa perlu adanya suatu tindakan untuk menanggulangi krisis imigran yang terjadi di negaranya. Hal ini dikarenakan kedatangan imigran ilegal dengan skala besar ke Italia mengakibatkan adanya penolakan dari para pihak yang anti imigran. Mereka menilai bahwa kedatangan imigran ilegal akan semakin memperumit kondisi keuangan Italia yang saat itu sedang memburuk. Dari meningkatnya angka pengangguran di Italia hingga perkembangan ekonomi Italia yang saat itu sedang menurun. Imigran-imigran ilegal yang datang ke Italia kebanyakan berada di usia produktif, yaitu dibawah 40 tahun. Kebanyakan dari mereka datang ke Italia untuk mencari pekerjaan di bidang-bidang kelas bawah seperti pertanian, pariwisata, jasa-jasa rumah tangga, hingga bisnis seperti komputer. Hal ini menjadi masalah karena para imigran ini bekerja secara ilegal, mengambil lahan pekerjaan milik warga Italia dan tidak membayar pajak ke pemerintah. Menanggapi krisis imigran yang semakin parah tersebut, pemerintah Italia merasa perlu adanya suatu tindakan untuk menanggulangi krisis imigran yang terjadi di negaranya.

Pada penelitian yang berjudul —Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal dari Jalur Laut Mediterania Tengah Periode 2016-2018||, penulis akan menggunakan konsep Imigran Internasional, dan juga Konsep *Maritime Security*.

Pembahasan

Pada tahun 2011 sampai 2015, Eropa berada ditengah gelombang peningkatan arus imigran yang buruk hingga menyebabkan krisis. Kasus imigrasi yang terjadi di Eropa adalah fenomena *mixed-migration* atau migrasi campuran, yang artinya orang-orang yang bermigrasi ke Eropa pada saat itu mempunyai alasan yang berbeda-beda entah itu karena mereka ingin mengungsi, mencari suaka, dan juga bermigrasi karena faktor ekonomi. Imigran-imigran ini bermigrasi menggunakan Laut Mediterania dikarenakan laut tersebut adalah satu-satunya pembatas antara benua Eropa dan Afrika juga Timur Tengah.

Laut Mediterania sebagai Jalur Imigrasi

Laut Mediterania adalah laut seluas 969.100 mil², dibatasi oleh Benua Eropa dibagian utara, Asia dibagian Timur, dan Afrika dibagian Selatan. Karena letak geografisnya tersebut, Laut Mediterania dijadikan jalur utama bagi para penyelundup untuk menyelundupkan para imigran dari Afrika dan Timur Tengah menuju Eropa. Untuk menuju Eropa, para imigran ini bermigrasi dengan beberapa jalur yaitu melalui jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Untuk menempuh jalur darat, para imigran biasanya menuju ke wilayah Turki lalu menuju ke Yunani, atau juga mereka menuju Maroko untuk kemudian bermigrasi ke Spanyol. Untuk jalur laut, para imigran menggunakan kapal untuk berlayar melalui jalur Laut Mediterania. Laut Mediterania sebagai jalur imigrasi ilegal terbagi menjadi tiga jalur:

- Jalur Laut Mediterania Timur melalui Laut Aegean dengan titik awal keberangkatan adalah Turki dan akan berakhir di Yunani atau Bulgaria,
- Jalur Laut Mediterania Tengah dengan melalui Laut Ionia atau Laut Thyrrhenia dengan titik awal keberangkatan Libya atau Tunisia dan akan berakhir di Italia dan Malta,
- Jalur Laut Mediterania Barat dengan melalui Laut Balearic, Spanyol (Kepulauan Balears) dengan titik awal keberangkatan Maroko atau Algeria dan akan berakhir di Spanyol.

Selain dikarenakan kedekatan geografis antara benua Afrika dengan benua Eropa yang hanya dipisahkan oleh Laut Mediterania, ada faktor pendorong lain yang membuat orang-orang di Afrika dan Timur Tengah bermigrasi ke Eropa, yaitu dikarenakan faktor ekonomi dan faktor kemanan negara.

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan utama para imigran untuk bermigrasi dari negara asalnya menuju ke Eropa. Biasanya, para imigran yang bermigrasi dikarenakan faktor ekonomi adalah para imigran yang berasal dari negara-negara di Afrika. Orang-orang di negara Afrika seperti Nigeria dan Gambia memutuskan untuk bermigrasi ke Eropa karena mereka mengalami kesulitan dibidang ekonomi mereka, seperti minimnya lapangan pekerjaan dan juga kemiskinan yang melanda negara mereka. kebanyakan para imigran yang bermigrasi karena faktor ekonomi bermigrasi secara ilegal tanpa adanya dokumen resmi untuk berpindah ke negara lain. Imigran-imigran ilegal ini mayoritas bermigrasi menggunakan jalur Laut Mediterania Tengah dan Mediterania Barat, karena jalur tersebut adalah yang paling dekat dengan negara-negara asal mereka. Pada periode 2015 sampai 2016, disaat jumlah imigran ilegal yang sampai di Italia berada di titik tertingginya, imigran-imigran ilegal tersebut berasal dari negara-negara miskin di Afrika dan Timur Tengah.

Implementasi Kebijakan Italia Dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah

Faktor keamanan negara asal merupakan hal yang membuat kebanyakan imigran pergi dari negara asalnya. Imigran-imigran ini memutuskan pergi dari negara asal mereka dikarenakan adanya konflik besar di negara mereka yang mengancam keselamatan mereka. Pada tahun 2015, saat terjadi krisis imigran besar-besaran di Eropa, diketahui kebanyakan dari imigran tersebut merupakan orang-orang yang meninggalkan negara asal mereka karena adanya konflik. Imigran-imigran tersebut mayoritas berasal dari negara-negara di Timur Tengah yaitu Suriah, Afghanistan, dan Iraq. Kebanyakan imigran-imigran yang bermigrasi karena adanya konflik dinegaranya bermigrasi melalui jalur Laut Mediterania Timur, dikarenakan jalur tersebut adalah jalur imigrasi yang paling dekat dengan negara asal mereka untuk menuju ke Eropa.

Upaya Terdahulu yang Dilakukan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran

Krisis imigran yang melanda Eropa pada tahun 2011 juga berimbas pada Italia. Ditambah lagi Italia merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, menyebabkan Italia menjadi salah satu gerbang bagi para imigran-imigran ini untuk menuju ke Eropa. Menanggapi krisis imigran yang terjadi di negaranya, pemerintah Italia melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengurangi jumlah imigran yang datang menuju Italia. Upaya-upaya ini ada yang dilakukan oleh Italia secara mandiri, dan juga dengan pihak-pihak lain yang dinilai dapat membantu Italia dalam menanggulangi krisis imigran.

Upaya pertama adalah *Operation Mare Nostrum*, yaitu program yang dilakukan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Italia dengan tujuan utama untuk mengintai kapal-kapal yang karam dan menyelamatkan imigran-imigran yang tenggelam di lautan Italia. Operasi Angkatan Laut dan Udara ini mulai beroperasi pada 18 Oktober 2013. Selama satu tahun berjalan, *Operation Mare Nostrum* berhasil menjalankan 421 misi *search and rescue* di Laut Mediterania Tengah, dan menyelamatkan kurang lebih 150.000 imigran yang terdampar di Laut Mediterania. Kapal milik Angkatan Laut Italia dilengkapi dengan alat pendeteksi yang bisa melacak keberadaan kapal lain di laut, setelah itu mereka kemudian memindahkan para imigran ke kapal milik Angkatan Laut Italia, menyelamatkan mereka dari potensi kapal karam karena kapal yang ditumpangi para imigran tersebut sangat tidak memadai.

Untuk melaksanakan *Operation Mare Nostrum*, pemerintah Italia harus mengeluarkan 9 Juta Euro tiap bulannya. Pemerintah Italia merasa bahwa biaya tersebut sangatlah besar untuk operasi *Search and rescue* yang harus ditanggung sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Italia kemudian meminta bantuan Uni Eropa untuk membantu membiayai *Operation Mare Nostrum*. Tetapi, negara-negara Uni Eropa tidak ada yang menggubris permintaan pemerintah Italia. Bahkan Pemerintah Inggris secara terang-terangan menolak untuk membantu membiayai operasi *search and rescue* milik Italia tersebut karena operasi tersebut dinilai hanya akan memperbanyak jumlah imigran yang datang dan memperparah krisis imigran di Eropa. Oleh karena itu, setelah satu tahun beroperasi, pemerintah Italia memutuskan untuk menghentikan *Operation Mare Nostrum*.

Setelah *Operation Mare Nostrum* dihentikan, banyak kasus tenggelamnya kapal imigran di Laut Mediterania. Melihat hal tersebut, Pemerintah Italia merasa perlu adanya upaya untuk menjaga Laut Mediterania. Oleh karena itu Pemerintah Italia menjalin kerjasama dengan Frontex, badan pengamanan batas negara milik Uni Eropa, untuk menjaga perbatasan Laut Mediterania Tengah. Kerjasama tersebut kemudian melahirkan *Operation Triton*, operasi penyelamatan di kawasan laut Italia setelah *Operation Mare Nostrum*. *Operation Triton* mulai dijalankan pada 1 November 2014, dan dihentikan oleh Frontex pada 1 Februari 2018. Pada saat *Operation Triton* berjalan, tugas utama mereka adalah mengontrol arus imigrasi, dan mengidentifikasi para imigran agar tidak ada

ancaman bahaya yang masuk ke wilayah Uni Eropa. Namun Operation Triton dinilai telah gagal dalam upaya mereka untuk menghentikan krisis imigran yang terjadi di Italia, terlihat dari jumlah imigran yang berhasil melewati Laut Mediterania Tengah menuju Italia berada di angka lebih dari 100 ribu imigran pada tahun 2015.

Pada bulan April 2015, tercatat ada lebih dari 1.000 imigran hanyut di Laut Mediterania Tengah. Hal ini merupakan angka kematian akibat imigrasi yang paling parah dalam sejarah imigrasi. Oleh karena itu, Italia merasa perlunya ada upaya lebih untuk pengamanan Laut Mediterania Tengah agar tidak dilewati penyelundup yang membawa para imigran. *Operation Sophia* dibentuk sebagai operasi yang mempunyai salah satu tujuan untuk menekan jumlah imigran yang meninggal di Laut Mediterania, sama seperti *Operation Mare Nostrum* yang telah dibuat oleh pemerintah Italia pada tahun 2013, namun terpaksa harus berhenti beroperasi pada tahun 2014 dikarenakan masalah dana yang dialami oleh pemerintah Italia dan juga kurangnya dukungan dari negara-negara Eropa lainnya. *Operation Sophia* memasuki fase aktif dan mulai melakukan operasi lautnya pada bulan Oktober 2015.

Saat pertama dibentuk, *Operation Sophia* mempunyai satu tugas utama, yaitu untuk mengidentifikasi, menangkap, lalu kemudian menghancurkan kapal jika kapal tersebut teridentifikasi sebagai kapal milik para penyelundup yang melakukan kegiatan imigrasi ilegal atau perdagangan manusia. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan *Operation Sophia* akan menangkap para penyelundup dan menjaga Laut Mediterania agar tidak digunakan sebagai jalur imigrasi ilegal. Tapi, pada 20 Juni 2016, Dewan Uni Eropa membuat keputusan untuk menambah dua tugas lagi untuk *Operation Sophia*, sehingga *Operation Sophia* mempunyai tiga tugas utama. Tugas tambahan tersebut diantaranya adalah *Operation Sophia* akan membantu pemerintah Libya untuk melatih pasukan penjaga perbatasan laut Italia dengan Libya, dan *Operation Sophia* untuk berkontribusi dalam pelaksanaan embargo senjata oleh *United Nations* (UN) di daerah lepas pantai Libya.

Setelah dua tahun *Operation Sophia* berjalan, pada tanggal 4 Juli 2017, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa *Operation Sophia* telah gagal dalam misinya untuk mengurangi jaringan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di Laut Mediterania juga mengatasi krisis imigran dari Laut Mediterania. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan oleh European Union Committee yang menyatakan —Menanggapi mandatnya, misi angkatan laut Uni Eropa dalam Operasi Med EUNAVFOR telah gagal mencapai tujuannya untuk mengurangi jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia di Laut Mediterania. Laporan itu juga menjelaskan bahwa —migrasi ilegal ke Eropa via Rute Mediterania Tengah meningkat 18% pada tahun 2016 dan 19% lainnya dalam enam bulan pertama tahun 2017 dibanding tahun 2016.]]

Tabel 1. Jumlah Imigran Gelap yang Datang Ke Eropa dari Jalur Laut Mediterania Tengah

Bulan	Tahun		
	2015	2016	2017
Januari	3.528	5.273	4.467
Februari	4.354	3.848	8.972
Maret	2.283	9.676	10.853
April	16.063	9.149	12.943
Mei	21.235	19.957	22.993
Juni	22.891	22.339	23.524

Implementasi Kebijakan Italia Dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah

Juli	23.186	23.552	11.461
Agustus	22.609	21.294	3.914
September	15.922	16.975	6.291
Oktober	8.916	27.384	5.979
November	3.218	13.581	5.645
Desember	9.637	8.428	2.327
Total	153.842	181.436	119.369

Analisis Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran di Italia

Pada tahun 2016, jumlah imigran yang datang ke Italia mencapai angka 181.436 imigran. Angka kedatangan ini lebih parah dari tahun sebelumnya yaitu 153.842. Menurut Perdana Menteri Italia saat itu Paolo Gentiloni, hal ini dikarenakan gagalnya upaya-upaya terdahulu yang telah dilakukan Italia dan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah Italia membuat kebijakan kerjasama dengan pemerintah Libya pada 2 Februari 2017 sebagai upaya baru milik Italia terkait penanggulangan krisis imigran yang terjadi di Italia. Perdana Menteri Italia yang menjabat saat itu, Paolo Gentiloni, dan Fayez al-Serraj, selaku kepala pemerintah dari *UN-backed Libyan Government of National Accord*, setuju untuk menandatangani *Memorandum of Understanding* terkait kerjasama pembangunan, pemberantasan imigrasi ilegal, penyelundupan manusia, penyelundupan bahan bakar, dan penguatan batas wilayah laut Libya dan Italia. MoU tersebut berisi 8 pasal tentang hal-hal terkait perjanjian yang telah disetujui oleh pemerintah Italia dan Libya.

Dalam MoU tersebut, pihak pemerintah Italia dan Libya menyatakan bahwa kedua negara bertekad untuk bekerjasama dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang memiliki dampak yang sangat buruk dan negatif bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas tidak hanya di antara kedua negara Italia dan Libya, tetapi juga wilayah Laut Mediterania secara keseluruhan. Hal ini akan berjalan bersamaan dengan adanya kesadaran akan kondisi yang sedang terjadi di Libya, yang membutuhkan bantuan untuk terpenuhinya tujuan kedua negara dan terciptanya negara Libya yang sipil dan demokratis.

Pendekatan dalam bentuk kerjasama dalam pembentukan *Memorandum of Understanding* terkait penanggulangan krisis imigran sebelumnya pernah dilakukan oleh pemerintah Italia dengan pemerintah Libya. Namun kerjasama tersebut selalu gagal dilaksanakan karena adanya faktor-faktor yang memaksa pemerintah Italia dan pemerintah Libya untuk membatalkan berjalannya MoU tersebut. perjanjian pertama adalah MoU yang ditandatangani oleh Silvio Berlusconi dan Muamar el-Qaddafi pada tahun 2008 yang harus dihentikan dikarenakan konflik buruk di Libya yang menyebabkan terbunuhnya Muammar El-Qaddafi. Perjanjian kedua adalah MoU yang disetujui kedua negara pada tahun 2012 terkait krisis imigran. Namun kedua negara kemudian memutuskan untuk membatalkan MoU ini karena adanya penolakan dari European Court of Human Rights, yang menganggap bahwa isi dari MoU yang dibentuk oleh pemerintah Italia dan Libya telah melanggar hukum imigrasi yang dianut oleh Uni Eropa dimana negara anggota Uni Eropa tidak boleh untuk mendeportasi imigran dari negara-negara konflik karena akan membahayakan nyawa sang imigran.

Menurut Drs. Sugiharyanto Imigrasi Internasional adalah perpindahan penduduk yang pergi ke suatu negara dari negara asalnya, dengan tujuan untuk menetap di negara baru tersebut dalam kurun waktu tertentu maupun permanen. Sedangkan secara konseptual, para imigran dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

a. *Settlers*, yaitu para imigran yang tinggal secara permanen di negara barunya

- b. *Contract workers*, yaitu para imigran yang tinggal di negara barunya karena kontrak kerja, dan akan kembali ke negara asal saat kontrak kerjanya habis
- c. *Professionals*, yaitu imigran yang bekerja di perusahaan besar dan menjabat di posisi yang penting, dan diharuskan untuk pindah ke negara baru karena urusan bisnis
- d. *Undocumented Workers*, yaitu imigran yang bekerja di negara baru secara ilegal, tanpa surat-surat dan izin bekerja dari negara barunya
- e. *Refugees*, yaitu para pencari perlindungan yang terpaksa meninggalkan negaranya karena ada suatu hal yang mengancam keberadaannya.

Lebih lanjut, imigran yang berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu imigran ilegal dan legal. Menurut Konsep Migrasi Internasional yang dipaparkan oleh Friedrich Heckmann, terdapat tiga bentuk dasar dari imigran yang ilegal: pertama adalah imigran yang melintasi batas negara dengan cara menyelundup; kedua adalah yang melintasi perbatasan dengan cara resmi, tetapi menggunakan surat-surat palsu untuk menuju negara barunya; ketiga adalah imigran yang tetap tinggal di negara barunya meskipun surat izin tinggalnya sudah habis.

Berdasarkan teori diatas, para penduduk dari Afrika yang menuju ke Italia melalui jalur Laut Mediterania Tengah merupakan imigran internasional yang masuk dalam klasifikasi *Ilegal Undocumented Workers*. Hal ini didasarkan pada fakta yang penulis dapatkan yaitu imigran-imigran dari benua Afrika yang bermigrasi ke Italia, biasanya berasal dari negara-negara yang terbelakang miskin. Mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka termasuk kedalam kategori *Undocumented Workers* karena mereka secara paksa menerobos batas laut Italia tanpa adanya dokumen-dokumen resmi untuk pindah bahkan pergi ke wilayah Italia.

Menurut Natalie Klein, ada indikator-indikator yang dapat mendorong suatu negara untuk melakukan upaya terkait pengamanan wilayah laut mereka, yaitu:

1. *Piracy and armed robbery*
2. *Terrorism*
3. *Trafficking in weapon of mass destruction (WMD)*
4. *Drug trafficking*
5. *People smuggling*
6. *Illegal, unreported, and unregulated fishing*
7. *Intentional and unlawful damage to the environment*
8. *Expanding categories of maritime security and threats*

Suatu negara akan segera melakukan tindakan terkait pengamanan laut jika dilaut tersebut ada kegiatan terkait hal-hal yang telah disebutkan diatas. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut tidak hanya akan menjadi masalah di wilayah laut tersebut saja, tetapi juga akan menjadi permasalahan yang besar di wilayah darat negara tersebut dan berpotensi mengancam keamanan nasional suatu negara.

Dalam penelitian ini penulis telah memaparkan bahwa krisis imigran yang terjadi di Italia terjadi karena adanya *people smuggler* yang membawa hingga ratusan ribu imigran ilegal ke Italia tiap tahunnya melalui jalur Laut Mediterania Tengah. Oleh karena itu, untuk menanggulangi krisis imigran ilegal yang terjadi di negaranya diperlukan adanya kebijakan terkait pengamanan wilayah Laut Mediterania Tengah. Krisis imigran ilegal yang menggunakan jasa *people smugglers* di Laut Mediterania Tengah telah menjadi permasalahan bagi Italia sejak 2011, dan telah mencapai puncaknya pada tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu masalah ini menjadi faktor pendorong Italia dalam melakukan upaya pembentukan kebijakan terkait pengamanan Laut Mediterania Tengah

Implementasi Kebijakan Italia Dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah

agar terbebas dari *people smugglers* yang membawa para imigran ilegal untuk menuju ke Italia.

Dalam Konsep *Maritime Security* yang dipaparkan oleh Natalie Klein, dijelaskan bahwa suatu negara akan mencoba melakukan suatu upaya agar negara tersebut dapat mendapat hak terkait pengambilan keputusan dan hak bernavigasi di wilayah laut tersebut. hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Italia, yaitu membentuk kebijakan kerjasama berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Libya terkait perjanjian untuk mengamankan wilayah laut Libya dari para *people smugglers* yang mencoba membawa imigran-imigran ilegal berlayar menuju ke daratan Italia. Libya dipilih oleh pemerintah Italia karena diketahui pesisir laut Libya dipilih sebagai titik keberangkatan favorit oleh para *people smugglers*, karena laut Libya mereka nilai tidak mempunyai pengamanan yang ketat dibanding dengan negara yang berbatasan dengan laut Italia lainnya seperti Tunisia.

Dalam MoU antara pemerintah Italia dan pemerintah Libya, kedua negara sepakat untuk bersama-sama melakukan upaya untuk menanggulangi krisis imigran yang terjadi di kedua negara. Dalam perjanjian tersebut pemerintah Libya bersedia menjaga wilayah laut mereka dari para *people smugglers* yang ingin menuju laut Italia dengan syarat Italia harus membiayai dan menyokong seluruh operasi angkatan laut Libya yang berupaya untuk menanggulangi krisis imigran ilegal tersebut. Dalam Konsep *Maritime Security* yang dipaparkan oleh Natalie Klein, upaya yang dilakukan pemerintah Italia dengan pemerintah Libya ini dinamakan proses kompromi.

Pemerintah Libya juga setuju untuk membentuk sebuah komite yang berisi pihak-pihak dari pemerintah Libya dan juga pemerintah Italia. Komite ini akan bertugas untuk mengidentifikasi tindakan dan instrumen apa yang harus diprioritaskan oleh kedua negara dalam perihal pembiayaan, implementasi, dan mengawasi komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh kedua negara. Jadi, pemerintah Italia mempunyai hak atas pengambilan keputusan dalam pembentukan upaya-upaya terkait pengamanan laut Libya dari para *people smugglers*. Proses ini dalam Konsep *Maritime Security* dinamakan pengklaiman atas hak eksklusif di wilayah laut lain.

Setelah melakukan proses kompromi dan proses pengklaiman atas hak eksklusif, pemerintah Italia dan pemerintah Libya kemudian mengimplementasikan upaya-upaya yang telah disetujui kedua pihak. Bentuk Implementasi dari MoU ini adalah pemerintah Italia memberikan dana dukungan ke pemerintah Libya sebesar 220 Juta Euro untuk mengamankan wilayah laut mereka. Italia juga memberikan 16 kapal ke angkatan laut milik Libya. pemerintah Italia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa untuk membantu Italia dalam melatih otoritas angkatan laut Libya yang bertugas untuk mengamankan laut Libya dari para imigran ilegal yang mencoba menuju daratan Italia. selain mengamankan perbatasan laut Libya, melakukan pendekatan dan kerjasama dengan aktor-aktor yang berada di Libya tetapi tidak berada dibawah pimpinan pemerintahan utama Libya di Tripoli seperti suku-suku dan kota-kota yang berada di selatan dan utara Libya untuk ikut menjaga perbatasan mereka dari imigran. Italia juga melakukan kerjasama dengan *International Organization for Migration* untuk memulangkan para imigran ilegal yang tertangkap di Laut Libya saat mencoba untuk berlayar menuju wilayah Italia.

Kesimpulan

Sejak tahun 2011 hingga 2015, Eropa mengalami krisis imigran yang sangat buruk. Puncaknya adalah pada tahun 2015 dimana jumlah imigran yang hadir ke Eropa mencapai lebih dari 1 Juta orang. Krisis imigran yang dialami oleh Eropa termasuk kedalam kasus *mixed migration*, yaitu kasus imigrasi besar yang disebabkan oleh imigran

dari berbagai macam latar belakang. Imigran-imigran ada yang datang ke Eropa untuk menyelamatkan diri karena konflik yang terjadi di tempat asalnya, dan ada juga yang datang ke Eropa karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik daripada di negara asalnya. Imigran-imigran tersebut memilih Eropa sebagai tujuan bermigrasi dikarenakan jaraknya yang dekat secara geografis dari negara asal para imigran, yaitu negara-negara di Afrika bagian utara dan juga Timur Tengah. Mereka menyebrangi Laut Mediterania untuk sampai ke daratan Eropa. Oleh karena itu, negara-negara Eropa yang berbatasan langsung dengan benua Afrika terkena dampak yang lebih besar dibanding negara-negara Eropa lainnya, termasuk Italia.

Untuk bisa sampai ke Italia, imigran-imigran yang mayoritas dari negara Afrika ini menggunakan *people smugglers* atau jasa penyelundup untuk diberangkatkan ke Libya, baru kemudian dari Libya mereka dibawa berlayar melalui Laut Mediterania Tengah untuk menuju ke daratan Italia. Setelah sampai di Italia, imigran-imigran ilegal ini kemudian akan tinggal di Italia untuk mencari pekerjaan atau ada juga yang menjadikan Italia sebagai negara transit dan pindah ke negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, Prancis, bahkan Inggris dan Swedia. Oleh karena itu krisis imigran ilegal ini dinilai memperburuk kondisi negara Italia yang sedang mengalami presentase pengangguran yang tinggi dan perkembangan ekonomi yang lemah. Imigran-imigran ilegal yang datang ke Italia mengambil lapangan kerja di Italia dan tidak membayar pajak ke negara. Hal ini menimbulkan gerakan-gerakan anti imigran di Italia. Orang-orang yang menyatakan mereka anti imigran melakukan demonstrasi besar menuntut pemerintah Italia menghentikan krisis imigran dan presentase pengangguran yang tinggi di negaranya. Jalur Laut Mediterania Tengah juga merupakan jalur yang sangat berbahaya untuk dilewati para imigran, dapat dilihat dari jumlah imigran yang tenggelam tiap tahunnya mencapai ribuan orang.

Italia telah membuat upaya-upaya terkait penanggulangan krisis imigran ilegal yang terjadi di negaranya. Upaya-upaya tersebut adalah *Operation Mare Nostrum*, *Operation Triton*, dan *Operation Sophia*. Namun upaya-upaya Italia tersebut dinilai gagal dalam menanggulangi krisis imigran. *Operation Mare Nostrum* harus dihentikan setelah satu tahun berjalan karena alasan biaya, dan upaya *search and rescue* yang dilakukan *Operation Triton* dan *Operation Sophia* ternyata mempermudah kerja para penyelundup manusia yang membawa imigran-imigran ilegal untuk sampai ke daratan Italia. Italia juga pernah membuat kerjasama dengan pemerintah Libya pada tahun 2008 dan 2012 untuk mengamankan Laut Mediterania Tengah dari penyelundup manusia dan menahan imigran ilegal di Libya. Tetapi kerjasama tersebut harus terhenti karena perang sipil yang terjadi di Libya dan juga adanya penolakan dari Uni Eropa terkait pelanggaran hak asasi imigran (*non-refoulement law*).

Setelah *Operation Sophia* gagal melakukan tugasnya dan meningkatnya angka kedatangan dan kematian imigran di Laut Mediterania Tengah di tahun 2016, Italia memutuskan untuk bertemu langsung dengan pemerintah Libya untuk membahas perjanjian kerjasama terkait penanggulangan krisis imigran di kedua negara, dan pada 2 Februari 2017 Paolo Gentiloni selaku Perdana Menteri Italia dan Fayej al-Serraj selaku ketua *Government of National Accord Libya* setuju untuk menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait penanggulangan krisis imigran antara kedua negara. Pembentukan memorandum ini didukung oleh Uni Eropa melalui *Malta Declaration* pada awal tahun 2017 yang menyadari bahwa kondisi migrasi di Laut Mediterania sangatlah berbahaya dan sedang mengalami krisis sehingga harus dihentikan dengan segera.

Setelah penandatanganan MoU tersebut, Italia dan Libya mulai bersama-sama melakukan upaya penanggulangan krisis imigran, terutama di wilayah Laut Mediterania Tengah. Italia memberikan 220 Juta Euro untuk memperkuat penjaga perbatasan Libya,

dan dibantu Uni Eropa mereka bekerja sama melatih ratusan penjaga perbatasan Libya. Italia juga memberikan kapal sebanyak 16 kapal hingga bulan Agustus 2018. Italia juga melakukan rapat dengan pemimpin-pemimpin suku-suku dan kota-kota di Libya yang tidak berada dibawah pimpinan *Presidential Council* di Tripoli, Libya, untuk mengajak bekerjasama dengan Italia dan Libya dalam menangkap para pelaku penyelundupan manusia dan menghentikan krisis imigran di Italia dan Libya.

Referensi

- Amnesti Internasional. (2014, 30 September). —Search and rescue operations in the central Mediterranean: Facts and Figures.|| <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/search-and-rescue-operations-central-mediterranean-facts-and-figures/> diakses pada 9 Mei 2019.
- Bilgin, Pinar. (2017). —A Global International Relations Take on the 'Immigrant Crisis'.|| Jerman: Trafo for Transregional Research.
- Council of the European Union. 2015. Special meeting of the European Council, 23 April 2015 – Statement. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/> diakses 1 April 2019.
- Council of the European Union. 2018. Frontex Annual Activity Report 2017. <https://www.statewatch.org/news/2018/jul/eu-frontex-annual-activity-report-2017.pdf> diakses pada 9 Mei 2019.
- International Organization for Migration. 2019. Europe — Mixed Migration Flows To Europe Monthly Overview. <http://migration.iom.int/reports/europe-%E2%80%94-mixed-migration-flows-europe-monthly-overview-january-2019?close=true> diakses pada 1 Mei 2019.
- Drs. Sugiharyanto. (2007). Geografi dan Sosiologi. Jakarta: PT. Yudhistira.
- EU Naval Force Med Media and Public Information Office. 2016. European Union Naval Force – Mediterranean Operation Sophia. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/february_2017_-_factsheet_on_eunavfor_med_mission_en_0.pdf diakses 1 April 2019.
- Eunavfor Med. 2016. EUNAVFOR MED: Operation Sophia flagship ITS GARIBALDI rescued over one thousand migrants. <https://www.operationsophia.eu/wp-content/uploads/2018/04/EUNAVFOR-MED-operation-SOPHIA-flagship-ITS-GARIBALDI-rescued-over-one-thousand-migrants-1.pdf> diakses pada 9 Mei 2019.
- Eunavfor Med. 2019. Eunavfor Med: Missions. <https://www.operationsophia.eu/wp-content/uploads/2019/04/PRESS-KIT.pdf> diakses pada 9 Mei 2019
- Eunavfor Med. (2015). Operation Sophia: Mission. <https://www.operationsophia.eu/about-us/#mission> diakses pada 9 Mei 2019.
- European Commission. 2014. Frontex Joint Operation 'Triton' – Concerted Efforts for managing migrator flows in the Central Mediterranean. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-609_en.htm diakses pada 9 Mei 2019.
- European Council. (2017). Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects of migration: addressing the Central Mediterranean route, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/> diakses pada 19 Juni 2019.
- European Parlemtent. 30 Juni 2017. EU Migrant Crisis: Facts and Figures. <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures> diakses pada 1 Mei 2019.

- European Union Committee House of Lords. Operation Sophia: A Failed Mission. <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcom/5/5.pdf> diakses pada 9 Mei 2019.
- Heckmann, Friedrich. (2004). *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*, *International Migration* Vol. 38, No. 3, Conceptual and Methodological Developments and the Study of International Migration.
- International Organization for Migration. 2018. *IOM Italy: Mediterranean Migrant Arrivals*.
- Italy dan Libya. (2017). *Memorandum of Understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic*.
- Kirwin, Matthew. & Anderson. (2018). —Who Wants to Migrate in Africa, and Why? Identifying the Factors Driving West African Migration. || Organisation for Economic Cooperation and Development.
- Klein, Natalie. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press Inc.
- Liga, Aldo. (2018). —Playing With Molecules || : Italian Approach to Libya. IFRI, Turkey/Middle East Program.
- Palm, Anja. (2017). —The Italy-Libya Memorandum of Understanding: The baseline of a policy approach aimed at closing all doors to Europe?. || EU Immigration and Asylum Law Policy. <https://eumigrationlawblog.eu/the-italy-libya-memorandum-of-understanding-the-baseline-of-a-policy-approach-aimed-at-closing-all-doors-to-europe/> diakses pada 19 Juni 2019.